

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

— *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga. UU Nomor 23 Tahun 2014 atas Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587.*

— *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua. UU Nomor 13 Tahun 2022 atas Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011, LN. 2022/No.143, TLN No. 6801.*

— *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN.2011/No. 82, TLN No. 5234.*

— *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, ps. 1 angka 1.*

— *Undang-Undang tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor, UU Nomor 156 Tahun 2021, BD. 202/NO. 156.*

— *Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, PP Nomor 12 Tahun 2018, LN.2018/NO.59, TLN NO.6197.*

— *Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Keempat, Perda Nomor 6 Tahun 2017 atas Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. Perda Nomor 15 Tahun 2004, Ld.2017/No.6, Tld/No.91.*

— *Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tentang Perubahan Kedua. Perda Nomor 1 Tahun 2022 Atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Perda Nomor 3 Tahun 2016, LD 2022/1*

— *Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Keempat, Perda Nomor 6 Tahun 2017 atas Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Kedudukan Protokoler*

Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
Perda Nomor 15 Tahun 2004, Ld.2017/No.6, Tld/No.91.

B. Buku

- Alexander, Harry, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : XSYS Solusindo, 2006.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasyimzoem, Yusnani, Satiawan, Iwan, Firmansyah Arif Ade, Siti Khoiriah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok : Raja Grafindo, 2022.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Lubis, Marzuki, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Moterio Matio Josef, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016.
- Ptera Kemal, Halim Hamzah, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Rauf, Rahyunir, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh, 2016.
- Renindo Kemal, Halim Harmzah, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah : Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2009.
- Rezah syah Farah, Qamar Nurul, *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makassar : Social Politic Genius, 2020.
- Rysfiana Yudi, Abdoellah y. Awan, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Simamora, Janpatar. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Medan: LAPIK, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1986. J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 2006.

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Syahyunir, Ateng, *Hubungan Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Bandung : Tarsito, 1982.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemda Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014*. Bandung : Nuansa Aulia, 2018.

Umar, Yustisianty Fadhillah, *Peraturan Daerah Dalam Konsep Negara Hukum Dan Permasalahannya*, Mamuju : Yankum, 2018.

Wignosubroto Soetandjo, *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta : Institute for Local Government, 2005.

Wirjosoegito, Soenobo, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

C. Lain-lainnya

Aisyah, Siti. "Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD studi kasus DPRD kota Bogor Periode 1999-2004" *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 2, Nomor. 1 Maret 2006.

Aryad Somad, Kemas. *Jurnal MMH*, "Kedudukan DPRD dalam Daerah Di Indonesia Paska Perubahan UUD 1945". Jilid 40 No. 4 Oktober 2011.

Ateng Syafrudin. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Banu L. Bagaskara, "Kota Bogor : DPRD kota Bogor dan Sejarahnya", tersedia di : <https://www.barayanews.co.id/dprd-kota-bogor-dan-sejarahnya/>, diakses tanggal 19 Juli 2021.

Boris Derurasman. "Renstra Rencana Strategis : Perubahan Tahun 2019-2024", tersedia di : <https://setwan.kotabogor.go.id/>, diakses tanggal 18 Desember 2023.

Dakiwu Sodialman, Laia Wahyuni Sri. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia" *Jurnal Education and development*, diterbitkan oleh Institut

Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.10 No.1 Januari 2022.

Detikcom Tim. "Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi hingga Tujuannya", tersedia di : <https://news.detik.com/berita/d-5995224/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya/amp>. Diakses tanggal 11 November 2023.

DPRD Jawa Barat. "Kedudukan, Tugas Pokok Serta Hak & Kewajiban", tersedia di : <http://dprd.jabarprov.go.id/profil/kedudukan-tugas-pokok-serta-hak-kewajiban>, diakses pada Kamis, 12 Desember 2023.

Handini, Pri Wulan. *Makalah Hukum Nasional Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif*, Vol. 49, Nomor 1 Tahun 2019.

Hasil wawancara. Eka Permana Anggota DPRD kota Bogor bagian Sekretariat Periode 2019-2024, Pada Rabu 08 November 2023.

Hayati Nur Dwi, Mikhael Gewati. "Tingkat Peran Legislasi dan Pengawasan, DPRD kota Bogor Gelar Refleksi Akhir Tahun 2021", tersedia di : <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/24/15151651/tingkatkan-peran-legislasi-dan-pengawasan-dprd-kota-bogor-gelar-refleksi>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

Humas. "Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan", tersedia di : <https://setkab.go.id/bagaimana-membuat-perencanaan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/>. Diakses tanggal 11 November 2021.

Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat, dan Winda Oktavia. "Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik", tersedia di : https://www.researchgate.net/publication/325472636_Landasan_dan_Asas_Asas_Pembentukan_Peraturan_PerundangUndangan_yang_Baik, diakses tanggal 18 Desember 2023.

Nurhayati Siti Ega. Sahkan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, DPRD Bogor Harap Kinerja Sektor Pendapatan Meningkat, tersedia di : <https://poskota.co.id/2023/09/08/sahkan-perda-pajak-dan-retribusi-daerah-dprd-bogor-harap-kinerja-sektor-pendapatan-meningkat>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024

Oktavianus, Afriman. "Pelaksanaan Hak DPRD dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif di DPRD Kota Serang Provinsi Banten", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, Nomor. 3 Oktober 2022,), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/19/>, diakses tanggal 2 Oktober 2023.

Siregar Hisar, Siburjan Kasman, Halawa Yanuarius. "Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal of Constitutional and Administrative Law*, Vol. 01, Nomor. 01, Mei 2022.

Suska. "Dasar-Dasar Teori". Tersedia di : <https://repository.uin-suska.ac.id/4186/3/9.%20BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 2 Oktober 2023

Sutrisno, Debbie, "140 Komunitas Kecam Perda Penyimpangan Seksual Milik Pemkot Bogor", tersedia di : <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/140-komunitas-kecam-perda-penyimpangan-seksual-milik-pemkot-bogor>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.